

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 30 Juli 2020

*Sumber Pengambilan Dokumen*

A	Provinsi Jawa Barat	
	1	Akhirnya Bisa Dapat Tunjangan Profesi Guru
		<i>Republika/Hal.14</i>

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Akhirnya Bisa Dapat Tunjangan Profesi Guru

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Republika/Hal.14

Edisi : Kamis,30 Juli 2020

## Proses seleksi terus dilakukan secara bertahap.

■ ARIE LUKIHARDIANTI

BANDUNG — Sebanyak 1.461 guru non-pegawai negeri sipil (PNS) tingkat SMA/SMK/SLB wilayah Jawa Barat (Jabar) akhirnya bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Hal itu bisa terwujud setelah keluarnya surat keputusan (SK) dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

SK perihal Penugasan Guru Bukan PNS Bersertifikasi pada SMA/SMK/SLB se-Jabar itu diserahkan secara simbolis oleh gubernur di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (29/7). SK ditujukan untuk 578 guru SMA, 852 guru SMK, dan 31 guru SLB. Sejumlah guru honorer yang hadir melakukan sujud syukur setelah menerima SK. Sementara ribuan lainnya menyaksikan penyerahan SK melalui tayangan konferensi video.

Salah seorang guru honorer di SMAN 9 Kota Bandung, Rizky SR, merasa bersyukur dengan keluarnya SK tersebut. Legalitas inilah yang selama ini diharapkan untuk dapat mendorong peningkatan kesejah-

teraan. Guru non-PNS yang menerima SK itu berhak menerima tunjangan profesi guru sebesar Rp 1,5 juta per bulan dari APBN. Dengan tambahan ini, Rizky mengatakan, penghasilannya dari semula Rp 2,04 juta menjadi Rp 3,54 juta per bulannya.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar berhasil menjalankan tugas untuk menyeleksi guru honorer yang kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi (pemprov), sehingga kemudian mendapatkan SK. Jabar pun diklaim sebagai provinsi pertama yang menuntaskan seleksi tahap pertama guru non-PNS SMA/SMK/SLB ini. "Kita dikawal PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), FAGI (Forum Aksi Guru Indonesia), sehingga berjalan lancar," kata gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Menurut Emil, tuntasnya seleksi tahap pertama ini memperkuat komitmen Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Sejak 2017, kata dia, pemprov sudah memberikan tunjangan

bagi guru honorer tingkat SMA/SMK/SLB. Nilainya Rp 2,04 juta per bulan. Menurut dia, komitmen diperlihatkan pemprov dalam menjalankan seleksi. Terlebih, seleksi dilakukan di tengah pandemi Covid-19, yang disebut menguras energi, termasuk keuangan daerah. "Walaupun kami terus dan fokus menangani Covid, membahas *emergency*. (SK guru non-PNS) ini juga bagian darurat. Ini peran luar biasa Dinas Pendidikan dan dukungan DPRD Komisi V," ujar dia.

Emil menyebut pemberian SK tersebut menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu diharapkan seiring meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer. "Perjuangan sangat panjang bagi guru-guru non-PNS untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak," ujar dia.

Untuk bisa mendapatkan SK, Emil mengatakan, ada beragam aspek yang harus dipenuhi oleh para guru honorer. Ia berharap para guru honorer lainnya yang belum lolos seleksi agar tidak putus asa, serta terus berupaya meningkatkan kapasitas. "Memang enggak mudah, harus memenuhi syarat. Apakah aspek

pedagoginya, profesionalitas, kepribadian, dan sosialnya," kata Emil.

Ribuan guru yang mendapatkan SK ini disebut sudah lolos seleksi berbagai tahap. Seperti seleksi pendidikan profesi guru, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memenuhi syarat jam mengajar 24 jam per pekannya. Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi mengatakan, SK penetapan dari gubernur diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menerima tunjangan profesi guru sebesar Rp 1,5 juta per bulan. "Syarat terakhirnya harus ada penetapan SK dari kepala daerah," kata dia.

Dengan SK ini, menurut Dedi, para guru non-PNS tersebut tak hanya berhak menerima tunjangan profesi, tapi juga akan dimasukkan dalam sistem kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Jadi, mereka punya nilai *inpassing* dengan penyetaraan sesuai golongan yang ada," ujarnya.

Menurut Dedi, ke depan penyeleksian akan terus dilakukan secara bertahap. "Di Jawa Barat ada 18.892 guru honorer. Sisanya akan terus diseleksi bertahap, sehingga nanti akan semakin banyak guru honorer yang diberi tunjangan tambahan," kata dia. ■ ed irfan fitrat

# Akhirnya Bisa Dapat Tunjangan Profesi Guru